

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat gambaran umum objek/subjek penelitian, proses uji kualitas instrumen dan data, hasil penelitian (uji hipotesis), dan pembahasan (interpretasi) yang sifat pelaporannya terpadu. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang dibantu dengan *software* SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi SPSS 15.0.

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul. Data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan jenis data berupa data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian yang terdiri dari 1 kantor, 5 badan, dan 19 dinas. Dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik untuk menentukan sampel sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti dengan cara menentukan kriteria tertentu yang dianggap mampu mewakili populasi. Kriteria yang digunakan yaitu pejabat pemerintah yang terdiri dari tingkat kepala baik kepala badan/dinas/kantor, sekretariat/sekretaris, kepala bidang/bagian, serta kepala subbidang/subbagian/seksi dari kantor, badan, dan dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

1. Demografi Kuesioner

Penyebaran dan pengembalian kembali kuesioner dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019 yang dilakukan secara bertahap. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, diperoleh data yang menunjukkan jumlah dan tingkat pengembalian kuesioner. Berikut merupakan rincian dan gambaran dari data jumlah kuesioner yang disebar dan kuesioner yang dapat diolah:

Tabel 4.1.
Tingkat Pengembalian Kuesioner

| Keterangan | Jumlah | Persentase |
|--|------------|--------------|
| Total Penyebaran Kuesioner | 125 | 100% |
| Jumlah Kuesioner yang Tidak Kembali | 2 | 1,6% |
| Total Kuesioner yang Kembali | 123 | 98,4% |
| Jumlah Kuesioner yang Kembali dengan Jawaban Tidak Lengkap | 1 | 0,8% |
| Jumlah Kuesioner yang Kembali tetapi Tidak Memenuhi Kriteria Responden | 2 | 1,6% |
| Total Kuesioner yang dapat Diolah atau Tingkat Pengembalian Kuesioner | 120 | 96% |

Sumber: Data Primer (2019)

Kuesioner disebar pada 25 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul yaitu kantor, badan, dan dinas dengan masing-masing OPD mendapat 5 buah kuesioner. Total kuesioner yang berhasil disebar peneliti kepada responden adalah 125 eksemplar dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 123 eksemplar atau sebesar 98,4%. Dari jumlah kuesioner yang kembali tersebut, terdapat 1 eksemplar dengan jawaban yang tidak lengkap dan 2 eksemplar yang tidak memenuhi kriteria responden sehingga kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini sejumlah 120. Dengan demikian, penelitian ini mempunyai *response rate* atau tingkat pengembalian sebesar 96%.

Tingkat pengembalian kuesioner yang tinggi tersebut kemungkinan dikarenakan peneliti menyertakan *souvenir* atau tanda terimakasih kepada responden. *Souvenir* yang diberikan yaitu satu paket sendok garpu dan satu taplak meja mini pada setiap responden. Selain itu, pemilihan *souvenir* juga didasarkan pada nilai manfaatnya sehingga dapat dipakai penerimanya. Tujuan pemberian *souvenir* yaitu untuk memikat hati responden yang merupakan langkah awal dalam menunjukkan keseriusan melakukan penelitian. Hal tersebut dapat mendorong responden mengisi pernyataan kuesioner dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Faktor lain dari tingginya tingkat pengembalian kuesioner yaitu peneliti memberikan jangka waktu pengembalian kuesioner yang cukup sehingga responden tidak merasa terbebani dan terburu-buru mengisi pernyataan kuesioner tersebut.

2. Demografi Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan, jabatan, dan lama jabatan. Berikut merupakan hasil distribusi frekuensi setiap karakteristik responden:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---------------|------------|-------------|
| Laki-Laki | 52 | 43,3% |
| Perempuan | 68 | 56,7% |
| Total | 120 | 100% |

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 52 orang (43,3%) dan responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 68 orang (56,7%). Artinya, responden yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden berjenis kelamin perempuan dengan tingkat persentase sebesar 56,7% dari total keseluruhan responden.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Karakteristik Berdasarkan Usia

| Usia | Jumlah | Persentase |
|--------------|---------------|-------------------|
| 21-35 Tahun | 29 | 24,2% |
| 36-50 Tahun | 67 | 55,8% |
| > 50 Tahun | 24 | 20,0% |
| Total | 120 | 100% |

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat responden berusia antara 21-35 tahun berjumlah 29 (24,2%), untuk responden berusia antara 36-50 tahun berjumlah 67 orang (55,8%), dan responden berusia di atas 50 tahun berjumlah 24 orang (20,0%). Artinya, responden yang paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden berusia antara 36-50 tahun dengan tingkat persentase sebesar 55,8%. Usia tersebut merupakan usia yang produktif dari seorang pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

| Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|----------------------------|---------------|-------------------|
| D3 | 3 | 2,5% |
| S1 | 81 | 67,5% |
| S2 | 36 | 30,0% |
| Total | 120 | 100% |

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat responden dengan jenjang pendidikan terakhir D3 berjumlah 3 orang (2,5%), untuk jenjang pendidikan terakhir S1 berjumlah 81 orang (67,5%), dan jenjang pendidikan terakhir S2 berjumlah 36 orang (30,0%). Artinya, jenjang pendidikan terakhir yang paling banyak dimiliki oleh responden yaitu S1 dengan tingkat persentase sebesar 67,5%. Dengan demikian, adanya pendidikan merupakan faktor yang mendasar untuk menjadi bagian organisasi tersebut karena dapat meningkatkan kualitas dari aparat pemerintah dalam penguasaan ilmu tertentu sesuai bidangnya.

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Karakteristik Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

| Latar Belakang Pendidikan | Jumlah | Persentase |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| MIPA | 3 | 2,5% |
| Akuntansi | 14 | 11,7% |
| Manajemen | 30 | 25,0% |
| Hukum | 13 | 10,8% |
| Lain-Lain | 60 | 50,0% |
| Total | 120 | 100% |

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang memiliki latar belakang pendidikan MIPA berjumlah 3 orang (2,5%), responden yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi berjumlah 14 orang (11,7%), responden yang memiliki latar belakang pendidikan manajemen berjumlah 14 orang (25,0%), responden yang memiliki latar belakang pendidikan hukum berjumlah 13 orang (10,8%), dan responden yang memiliki latar belakang pendidikan lainnya berjumlah 60 orang (50%). Artinya, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh setiap responden sangat beragam seperti teknik, sosiologi, ilmu pemerintahan, dan lain-lain.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Karakteristik Berdasarkan Jabatan

| Jabatan | Jumlah | Persentase |
|----------------------------------|---------------|-------------------|
| Kepala Kantor/Badan/Dinas | 3 | 2,5% |
| Sekretaris | 5 | 4,2% |
| Kepala Bidang/Bagian | 34 | 28,3% |
| Kepala subbidang/subbagian/seksi | 78 | 65,0% |
| Total | 120 | 100% |

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini dengan jabatan kepala kantor/badan/dinas berjumlah 3 orang (2,5%), jabatan sekretaris berjumlah 5 orang (4,2%), jabatan kepala bidang/bagian berjumlah 34 (28,3%), dan jabatan kepala subbidang/subbagian/seksi berjumlah 78 (65,0%). Artinya, jabatan yang paling banyak dimiliki oleh responden yaitu kepala subbidang/subbagian/seksi dengan tingkat persentase sebesar 65,0%. Karakteristik jabatan merupakan kriteria paling utama dalam penelitian ini karena responden dengan jabatan tingkat kepala

merupakan perwakilan dari staf-staf yang terdapat dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut.

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jabatan

Karakteristik responden berdasarkan lama jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7.
Karakteristik Berdasarkan Lama Jabatan

| Lama Jabatan | Jumlah | Persentase |
|---------------------|---------------|-------------------|
| < 1 Tahun | 22 | 18,3% |
| 1-5 Tahun | 61 | 50,8% |
| 6-10 Tahun | 24 | 20,0% |
| > 10 Tahun | 13 | 10,8% |
| Total | 120 | 100% |

Sumber: Data Primer (2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menjabat selama kurang dari 1 tahun berjumlah 22 orang (18,3%), menjabat selama 1-5 tahun berjumlah 61 orang (50,8%), menjabat selama 6-10 tahun berjumlah 24 orang (20,0%), dan menjabat selama lebih dari 10 tahun berjumlah 13 orang (10,8%). Artinya, responden paling banyak berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki lama jabatan 1-5 tahun dengan tingkat persentase sebesar 50,8%.

B. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat gambaran mengenai berapa jumlah sampel, minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), interaksi antara Sistem Pengendalian Intern

dengan Komitmen Organisasi (SPI*KO), interaksi antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan Komitmen Organisasi (KPP*KO), serta Kinerja Pemerintah Daerah (KPD). Dari 125 kuesioner yang disebar, terdapat 123 kuesioner kembali, dan analisis dilakukan terhadap 120 kuesioner dengan jawaban serta responden yang memenuhi kriteria untuk diolah lebih lanjut. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8.
Statistik Deskriptif

| Variabel | N | Kisaran Teoritis | | | Kisaran Aktual | | | Std. Deviation |
|--------------------|-----|------------------|------|------|----------------|------|---------|----------------|
| | | Min | Max | Mean | Min | Max | Mean | |
| SPI | 120 | 20 | 100 | 60 | 63 | 100 | 82,65 | 8,739 |
| KPP | 120 | 7 | 35 | 21 | 17 | 35 | 28,71 | 3,670 |
| KO | 120 | 7 | 35 | 21 | 20 | 35 | 28,95 | 3,456 |
| SPI*KO | 120 | 140 | 3500 | 1820 | 1323 | 3500 | 2443,58 | 492,772 |
| KPP*KO | 120 | 49 | 1225 | 637 | 441 | 1260 | 839,24 | 183,465 |
| KPD | 120 | 9 | 45 | 27 | 23 | 45 | 34,73 | 4,878 |
| Valid N (listwise) | 120 | | | | | | | |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan uji statistik deskriptif mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban responden. Nilai minimum yang dimaksud dalam statistik deskriptif tersebut yaitu nilai minimum jawaban yang diberikan dari 120 responden. Selain itu, nilai maksimum yang dimaksud adalah nilai maksimum jawaban yang diberikan dari 120 responden. Mean menunjukkan nilai rata-rata dari beberapa data yang menggambarkan data tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. Selanjutnya, standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data

individu ke mean. Selain itu, analisis statistik deskriptif juga menjelaskan mengenai nilai kisaran teoritis dan nilai kisaran aktual. Apabila nilai minimum dan mean dari kisaran aktual $>$ nilai minimum dan mean dari kisaran teoritis maka termasuk kategori tinggi dalam perlakuan terhadap variabel tersebut. Selanjutnya, apabila nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual maka menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi.

Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dengan 120 responden memiliki nilai minimum 20 dan nilai maksimum 100 dengan mean (rata-rata) sebesar 60 pada kisaran teoritis. Namun, pada kisaran aktual menunjukkan nilai minimum 63 dan nilai maksimum 100 dengan mean (rata-rata) sebesar 82,65. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual yaitu 63 dan 82,56 lebih besar daripada nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis yaitu 20 dan 60. Hal tersebut menunjukkan rata-rata sistem pengendalian intern aparatur pemerintah daerah di Kabuapten Bantul dalam kategori tinggi. Variabel ini juga memiliki nilai standar deviasi sebesar 8,739 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual sebesar 82,65 yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian, responden memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem pengendalian intern yang terdapat pada pemerintah daerah tersebut.

Sementara itu, variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) dengan 120 responden memiliki nilai minimum 7 dan nilai maksimum 35 dengan mean (rata-rata) sebesar 21 pada kisaran teoritis. Namun, pada kisaran aktual menunjukkan nilai minimum 17 dan nilai maksimum 35 dengan mean (rata-rata) sebesar 28,71.

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual yaitu 17 dan 28,71 lebih besar daripada nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis yaitu 7 dan 21. Hal tersebut menunjukkan rata-rata ketaatan pada peraturan perundangan aparatur pemerintah daerah di Kabuapten Bantul dalam kategori tinggi. Variabel ini juga memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,670 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual sebesar 28,71 yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Jadi, responden menyadari ketaatan pada peraturan perundangan adalah penting untuk menghindari terjadinya tindakan yang melanggar hukum.

Selanjutnya, variabel Komitmen Organisasi (KO) dengan 120 responden memiliki nilai minimum 7 dan nilai maksimum 35 dengan mean (rata-rata) sebesar 21 pada kisaran teoritis. Namun, pada kisaran aktual menunjukkan nilai minimum 20 dan nilai maksimum 35 dengan mean (rata-rata) sebesar 28,95. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual yaitu 20 dan 28,95 lebih besar daripada nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis yaitu 7 dan 21. Hal tersebut menunjukkan rata-rata komitmen organisasi aparatur pemerintah daerah di Kabuapten Bantul dalam kategori tinggi. Variabel ini juga memiliki nilai standar deviasi sebesar 3,456 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual sebesar 28,95 yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Dengan kata lain, responden memiliki komitmen dan tanggung jawab yang tinggi terhadap organisasinya.

Interaksi yang terjadi antara variabel Sistem Pengendalian Intern dengan Komitmen Organisasi (SPI*KO) dengan 120 responden memiliki nilai minimum 140

dan nilai maksimum 3500 dengan mean (rata-rata) sebesar 1820 pada kisaran teoritis. Namun, pada kisaran aktual menunjukkan nilai minimum 1323 dan nilai maksimum 3500 dengan mean (rata-rata) sebesar 2443,58. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual yaitu 1323 dan 2443,58 lebih besar daripada nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis yaitu 140 dan 1820. Hal tersebut menunjukkan rata-rata sistem pengendalian intern yang diperkuat dengan komitmen organisasi aparatur pemerintah daerah di Kabuapten Bantul dalam kategori tinggi. Variabel ini juga memiliki nilai standar deviasi sebesar 492,772 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual sebesar 2443,58 yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa responden meyakini dengan adanya komitmen organisasi dapat meminimalisir terjadinya sesuatu diluar rencana karena kesesuaian prosedur dan perilaku dari pegawai.

Interaksi yang terjadi antara variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan Komitmen Organisasi (KPP*KO) dengan 120 responden memiliki nilai minimum 49 dan nilai maksimum 1225 dengan mean (rata-rata) sebesar 637 pada kisaran teoritis. Namun, pada kisaran aktual menunjukkan nilai minimum 441 dan nilai maksimum 1260 dengan mean (rata-rata) sebesar 839,24. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual yaitu 441 dan 839,24 lebih besar daripada nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis yaitu 49 dan 637. Hal tersebut menunjukkan rata-rata ketaatan pada peraturan perundangan yang diperkuat dengan komitmen organisasi aparatur pemerintah daerah di Kabuapten Bantul dalam kategori tinggi. Variabel ini juga memiliki nilai

standar deviasi sebesar 183,465 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual sebesar 839,24 yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Oleh sebab itu, responden merasa diperlukann adanya aturan yang berlaku terutama peraturan perundangan dalam menjalankan kewajiban dalam pemerintahan dan komitmen untuk menghindari hal-hal yang merugikan organisasi.

Sementara itu, variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) dengan 120 responden memiliki nilai minimum 9 dan nilai maksimum 45 dengan mean (rata-rata) sebesar 27 pada kisaran teoritis. Namun, pada kisaran aktual menunjukkan nilai minimum 23 dan nilai maksimum 45 dengan mean (rata-rata) sebesar 34,75. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran aktual yaitu 23 dan 34,75 lebih besar daripada nilai minimum dan mean (rata-rata) dari kisaran teoritis yaitu 9 dan 27. Hal tersebut menunjukkan rata-rata kinerja aparatur pemerintah daerah di Kabuapten Bantul dalam kategori tinggi. Variabel ini juga memiliki nilai standar deviasi sebesar 4,878 dimana nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean (rata-rata) pada kisaran aktual sebesar 34,75 yang menunjukkan semakin kecil penyimpangan yang terjadi. Jika demikian, responden memiliki pengetahuan yang luas bagaimana menilai kinerja dari pemerintah daerah.

C. Uji Kualitas Instrumen

Dalam penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Selain itu, benar atau tidaknya data bergantung dari baik tidaknya

instrumen pengumpulan data. Pengujian instrumen biasanya terdiri dari uji validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu pengukuran kualitas dari instrumen data yang digunakan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Apabila validitas yang dimiliki tinggi maka semakin kecil pula tingkat kesalahannya sehingga data yang digunakan merupakan data yang memadai. Uji validitas ini dilakukan dengan uji homogenitas data, yaitu dilakukan dengan cara melakukan uji korelasi terhadap item-item pernyataan dengan skor total (*pearson correlation*). Seluruh item pembentuk variabel dikatakan valid apabila memiliki korelasi (r) dari skor total masing-masing yaitu $\geq 0,25$ atau memiliki nilai sig dari skor total masing-masing yaitu $< 0,05$ dengan melihat tabel “*correlations*”. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9.
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Butir Pernyataan | R | Sig. | Keterangan |
|----------------------------------|------------------|-------|------|------------|
| Sistem Pengendalian Intern (SPI) | SPI1 | 0,652 | 0,00 | Valid |
| | SPI2 | 0,759 | 0,00 | Valid |
| | SPI3 | 0,796 | 0,00 | Valid |
| | SPI4 | 0,592 | 0,00 | Valid |
| | SPI5 | 0,811 | 0,00 | Valid |
| | SPI6 | 0,748 | 0,00 | Valid |
| | SPI7 | 0,751 | 0,00 | Valid |
| | SPI8 | 0,574 | 0,00 | Valid |
| | SPI9 | 0,802 | 0,00 | Valid |
| | SPI10 | 0,782 | 0,00 | Valid |
| | SPI11 | 0,807 | 0,00 | Valid |
| | SPI12 | 0,808 | 0,00 | Valid |
| | SPI13 | 0,722 | 0,00 | Valid |

| Variabel | Butir Pernyataan | R | Sig. | Keterangan |
|---|------------------|-------|------|------------|
| | SPI14 | 0,773 | 0,00 | Valid |
| | SPI15 | 0,791 | 0,00 | Valid |
| | SPI16 | 0,629 | 0,00 | Valid |
| | SPI17 | 0,755 | 0,00 | Valid |
| | SPI18 | 0,807 | 0,00 | Valid |
| | SPI19 | 0,844 | 0,00 | Valid |
| | SPI20 | 0,835 | 0,00 | Valid |
| Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) | KPP1 | 0,793 | 0,00 | Valid |
| | KPP2 | 0,704 | 0,00 | Valid |
| | KPP3 | 0,865 | 0,00 | Valid |
| | KPP4 | 0,904 | 0,00 | Valid |
| | KPP5 | 0,937 | 0,00 | Valid |
| | KPP6 | 0,890 | 0,00 | Valid |
| | KPP7 | 0,891 | 0,00 | Valid |
| Komitmen Organisasi (KO) | KO1 | 0,815 | 0,00 | Valid |
| | KO2 | 0,732 | 0,00 | Valid |
| | KO3 | 0,792 | 0,00 | Valid |
| | KO4 | 0,860 | 0,00 | Valid |
| | KO5 | 0,886 | 0,00 | Valid |
| | KO6 | 0,866 | 0,00 | Valid |
| | KO7 | 0,834 | 0,00 | Valid |
| Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) | KPD1 | 0,859 | 0,00 | Valid |
| | KPD2 | 0,802 | 0,00 | Valid |
| | KPD3 | 0,772 | 0,00 | Valid |
| | KPD4 | 0,867 | 0,00 | Valid |
| | KPD5 | 0,721 | 0,00 | Valid |
| | KPD6 | 0,829 | 0,00 | Valid |
| | KPD7 | 0,737 | 0,00 | Valid |
| | KPD8 | 0,787 | 0,00 | Valid |
| | KPD9 | 0,717 | 0,00 | Valid |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan uji validitas mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban responden. Butir pernyataan mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) yang diajukan kepada responden

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul adalah valid. Hal tersebut dikarenakan seluruh item pembentuk variabel memiliki nilai korelasi (r) dari skor total masing-masing yaitu $\geq 0,25$ atau memiliki nilai sig dari skor total masing-masing yaitu $< 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

Selain menggunakan *pearson product moment*, dalam pengujian validitas juga dapat menggunakan analisis faktor. Analisis faktor adalah suatu teknik analisis yang memuat informasi tentang pengelompokan variabel faktor dalam suatu penelitian. Analisis faktor bertujuan untuk menyaring variabel mana yang paling unggul atau paling dominan dari beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Hasil analisis faktor dapat juga digunakan untuk membedakan komponen atau variabel prioritas berdasarkan perengkingan yang ada. Terdapat beberapa output yang dihasilkan dalam pengujian dengan analisis faktor. Tabel output tersebut yaitu yaitu *KMO and Bartlett's Test*, *Anti-Image Matrices*, *Communalities*, *Total Variance Explained*, dan *Component Matrix*.

Tabel output pertama dalam analisis faktor yaitu “KMO and Bartlett’s Test” yang berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut menggunakan teknik analisis faktor atau tidak. Caranya dengan melihat nilai *Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Jika nilai KMO MSA lebih besar dari 0,50 maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Hasil analisis faktor dengan tabel “KMO and Bartlett’s Test” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.10.
Hasil Analisis Faktor KMO and Bartlett's Test

| Variabel | KMO MSA | Sig. |
|---|---------|-------|
| Sistem Pengendalian Intern (SPI) | 0,941 | 0,000 |
| Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) | 0,888 | 0,000 |
| Komitmen Organisasi (KO) | 0,901 | 0,000 |
| Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) | 0,910 | 0,000 |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis faktor dengan output tabel “KMO and Bartlett's Test” mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban reponden. Selanjutnya, dari output tersebut diketahui nilai KMO MSA dari variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) lebih besar daripada 0,50. Selain itu, nilai *Bartlett's Test of Sphericity* (sig) dari masing-masing variabel yaitu sebesar 0,000 lebih kecil daripada *alpha* 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama.

Tabel output kedua dalam analisis faktor yaitu “Anti-Image Matrices” yang berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak pakai dalam analisis faktor. Jika nilainya lebih besar atau sama dengan 0,50 maka semua faktor pembentuk variabel tersebut tidak ada yang direduksi. Pada bagian *anti-image correlation* terdapat kode huruf (a) yang artinya tanda untuk *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) dan pertama kali yang harus dikeluarkan adalah variabel yang memiliki nilai MSA paling kecil atau kurang dari 0,50. Hasil analisis faktor dengan tabel “Anti-Image Matrices” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11.
Hasil Analisis Faktor Anti-Image Matrices

| Variabel | Butir Pernyataan | MSA |
|---|-------------------------|------------|
| Sistem Pengendalian Intern (SPI) | SPI1 | 0,939 |
| | SPI2 | 0,938 |
| | SPI3 | 0,954 |
| | SPI4 | 0,936 |
| | SPI5 | 0,960 |
| | SPI6 | 0,931 |
| | SPI7 | 0,942 |
| | SPI8 | 0,932 |
| | SPI9 | 0,955 |
| | SPI10 | 0,947 |
| | SPI11 | 0,948 |
| | SPI12 | 0,955 |
| | SPI13 | 0,934 |
| | SPI14 | 0,941 |
| | SPI15 | 0,955 |
| | SPI16 | 0,932 |
| | SPI17 | 0,936 |
| | SPI18 | 0,940 |
| | SPI19 | 0,901 |
| | SPI20 | 0,932 |
| Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) | KPP1 | 0,942 |
| | KPP2 | 0,951 |
| | KPP3 | 0,831 |
| | KPP4 | 0,855 |
| | KPP5 | 0,904 |
| | KPP6 | 0,887 |
| | KPP7 | 0,909 |
| Komitmen Organisasi (KO) | KO1 | 0,943 |
| | KO2 | 0,936 |
| | KO3 | 0,933 |
| | KO4 | 0,901 |
| | KO5 | 0,896 |
| | KO6 | 0,866 |
| | KO7 | 0,859 |
| Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) | KPD1 | 0,896 |
| | KPD2 | 0,943 |
| | KPD3 | 0,907 |
| | KPD4 | 0,896 |

| Variabel | Butir Pernyataan | MSA |
|----------|------------------|-------|
| | KPD5 | 0,893 |
| | KPD6 | 0,882 |
| | KPD7 | 0,913 |
| | KPD8 | 0,943 |
| | KPD9 | 0,926 |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis faktor dengan output tabel “Anti-Image Matrices” mengenai jawaban responden untuk setiap butir pernyataan variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban responden. Selanjutnya, dari output tersebut diketahui nilai MSA masing-masing butir pernyataan dari variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) lebih besar daripada 0,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh faktor pembentuk variabel tersebut menghasilkan korelasi yang tinggi dan memenuhi kriteria sebagai pembentuk konstruk sehingga tidak ada faktor yang direduksi.

Tabel output ketiga dalam analisis faktor yaitu “Communalities” yang menunjukkan seberapa besar faktor yang nantinya terbentuk mampu menjelaskan variabel. Untuk itu harus dilihat tabel “Communalities” pada bagian *extraction*. Semakin besar nilai *extraction* dari faktor tersebut maka semakin kuat hubungan antara variabel dengan faktor yang terbentuk yaitu apabila mendekati nilai 1 atau 100% dan sebaliknya semakin kecil nilai *extraction* berarti semakin lemah hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Hasil analisis faktor dengan tabel “Communalities” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12.
Hasil Analisis Faktor Communalities

| Variabel | Butir Pernyataan | Extraction |
|---|-------------------------|-------------------|
| Sistem Pengendalian Intern (SPI) | SPI1 | 0,501 |
| | SPI2 | 0,582 |
| | SPI3 | 0,659 |
| | SPI4 | 0,454 |
| | SPI5 | 0,703 |
| | SPI6 | 0,616 |
| | SPI7 | 0,620 |
| | SPI8 | 0,314 |
| | SPI9 | 0,659 |
| | SPI10 | 0,623 |
| | SPI11 | 0,716 |
| | SPI12 | 0,681 |
| | SPI13 | 0,600 |
| | SPI14 | 0,653 |
| | SPI15 | 0,679 |
| | SPI16 | 0,406 |
| | SPI17 | 0,638 |
| | SPI18 | 0,710 |
| | SPI19 | 0,754 |
| | SPI20 | 0,721 |
| Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) | KPP1 | 0,625 |
| | KPP2 | 0,459 |
| | KPP3 | 0,757 |
| | KPP4 | 0,827 |
| | KPP5 | 0,889 |
| | KPP6 | 0,801 |
| | KPP7 | 0,801 |
| Komitmen Organisasi (KO) | KO1 | 0,658 |
| | KO2 | 0,519 |
| | KO3 | 0,600 |
| | KO4 | 0,754 |
| | KO5 | 0,800 |
| | KO6 | 0,759 |
| | KO7 | 0,707 |
| Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) | KPD1 | 0,759 |
| | KPD2 | 0,662 |
| | KPD3 | 0,610 |
| | KPD4 | 0,769 |

| Variabel | Butir Pernyataan | Extraction |
|----------|------------------|------------|
| | KPD5 | 0,481 |
| | KPD6 | 0,676 |
| | KPD7 | 0,527 |
| | KPD8 | 0,616 |
| | KPD9 | 0,523 |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis faktor dengan output tabel “Communalities” mengenai jawaban responden untuk setiap butir pernyataan variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban responden. Selanjutnya, dari output tersebut diketahui nilai *extraction* masing-masing butir pernyataan dari variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) rata-rata memiliki nilai yang cukup tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara variabel dengan faktor yang terbentuk yaitu faktor tersebut mampu menjelaskan variabel.

Tabel output keempat dalam analisis faktor yaitu “Total Variance Explained” yang menunjukkan nilai masing-masing komponen atau butir pernyataan yang dianalisis. Ada dua macam analisis untuk menjelaskan suatu varian, yaitu *initial eigenvalues* dan *extraction sums of squared loadings*. Pada varian *initial eigenvalues* menunjukkan faktor yang terbentuk. *Eigenvalues* digunakan untuk menganalisis layak atau tidak suatu faktor baru. Syarat layak menjadi faktor baru adalah *eigenvalues* lebih besar atau sama dengan 1, sedangkan apabila terdapat faktor yang memiliki *eigenvalues* kurang dari 1 maka faktor tersebut akan dikeluarkan atau tidak digunakan. Sementara itu, pada bagian *extraction sums of squared loadings*

menunjukkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Nilai *cumulative variance* menunjukkan besarnya tingkat keterwakilan faktor baru yang terbentuk terhadap faktor awal atau semula. Syaratnya apabila faktor baru yang terbentuk mampu mewakili faktor awal atau semula maka nilai *cumulative variance* lebih besar dari 60%. Hasil analisis faktor dengan tabel “Total Variance Explained” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.13.
Hasil Analisis Faktor Total Variance Explained

| Variabel | Component | Extraction Sums of Squared Loadings | | |
|----------|-----------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | | Total | % of Variance | Cumulative % |
| SPI | 1 | 12,292 | 61,461 | 61,461 |
| KPP | 1 | 5,159 | 73,701 | 73,701 |
| KO | 1 | 4,807 | 68,668 | 68,668 |
| KPD | 1 | 5,623 | 62,472 | 62,472 |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis faktor dengan output tabel “Total Variance Explained” mengenai jawaban responden untuk setiap butir pernyataan variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban reponden. Selanjutnya, dari output tersebut diketahui bahwa dari keseluruhan variabel yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) dari masing-masing item yang digunakan menghasilkan jumlah variasi atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk adalah 1 faktor. Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) menghasilkan 1 faktor yang terbentuk dengan kemampuan menjelaskan konstruk sebesar 61,461%. Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) menghasilkan 1 faktor yang terbentuk dengan kemampuan

menjelaskan konstruk sebesar 73,701%. Variabel Komitmen Organisasi (KO) menghasilkan 1 faktor yang terbentuk dengan kemampuan menjelaskan konstruk sebesar 68,668%. Variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) menghasilkan 1 faktor yang terbentuk dengan kemampuan menjelaskan konstruk sebesar 62,472%. Nilai cumulative tersebut menunjukkan angka lebih besar daripada 60%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor baru yang terbentuk mampu mewakili faktor awal atau semula.

Tabel output kelima dan merupakan yang terakhir dalam analisis faktor yaitu “Component Matrix” yang menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Korelasi yang terbesar pada penelitian ini ada pada komponen satu dikarenakan masing-masing variabel menghasilkan satu faktor baru yang terbentuk. Korelasi tersebut juga disebut dengan faktor *loading*. Apabila faktor *loading* yang terbentuk lebih besar dari 0,50 maka menunjukkan semakin layak faktor tersebut untuk merangkum variabel yang dianalisis atau dapat dikatakan keseluruhan item pembentuk variabel adalah valid. Hasil analisis faktor dengan tabel “Component Matrix” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14.
Hasil Analisis Faktor Component Matrix

| Variabel | Item | Component |
|----------------------------------|------|-----------|
| | | 1 |
| Sistem Pengendalian Intern (SPI) | SPI1 | 0,708 |
| | SPI2 | 0,763 |
| | SPI3 | 0,812 |
| | SPI4 | 0,674 |
| | SPI5 | 0,838 |

| Variabel | Item | Component | |
|---------------------------------|---|-----------|-------|
| | | 1 | |
| | SPI6 | 0,785 | |
| | SPI7 | 0,788 | |
| | SPI8 | 0,561 | |
| | SPI9 | 0,812 | |
| | SPI10 | 0,789 | |
| | SPI11 | 0,846 | |
| | SPI12 | 0,825 | |
| | SPI13 | 0,774 | |
| | SPI14 | 0,808 | |
| | SPI15 | 0,824 | |
| | SPI16 | 0,637 | |
| | SPI17 | 0,799 | |
| | SPI18 | 0,842 | |
| | SPI19 | 0,869 | |
| | SPI20 | 0,849 | |
| | Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) | KPP1 | 0,790 |
| | | KPP2 | 0,678 |
| | | KPP3 | 0,870 |
| | | KPP4 | 0,909 |
| | | KPP5 | 0,943 |
| KPP6 | | 0,895 | |
| KPP7 | | 0,895 | |
| Komitmen Organisasi (KO) | KO1 | 0,817 | |
| | KO2 | 0,720 | |
| | KO3 | 0,774 | |
| | KO4 | 0,869 | |
| | KO5 | 0,895 | |
| | KO6 | 0,871 | |
| | KO7 | 0,841 | |
| Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) | KPD1 | 0,871 | |
| | KPD2 | 0,814 | |
| | KPD3 | 0,781 | |
| | KPD4 | 0,877 | |
| | KPD5 | 0,694 | |
| | KPD6 | 0,822 | |
| | KPD7 | 0,726 | |
| | KPD8 | 0,785 | |
| | KPD9 | 0,723 | |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan analisis faktor dengan output tabel “Component Matrix” mengenai jawaban responden untuk setiap butir pernyataan variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban responden. Selanjutnya, dari output tersebut diketahui bahwa dari keseluruhan variabel yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) dari masing-masing item yang digunakan menghasilkan nilai komponen lebih besar daripada 0,50. Artinya, seluruh *component* dari masing-masing variabel memiliki *loading factor* yang besar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh item dari masing-masing variabel adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, uji reliabilitas adalah pengujian untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran dapat dipercaya atau uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepercayaan pada kebenaran atau kesungguhan jawaban instrumen. Instrumen penelitian yang memiliki nilai *cronbach's alpha* $< 0,50$ maka reliabilitasnya rendah; instrumen penelitian yang memiliki nilai *cronbach's alpha* antara 0,50-0,70 maka reliabilitasnya moderat; instrumen penelitian yang memiliki nilai *cronbach's alpha* antara 0,70-0,90 maka reliabilitasnya tinggi; dan instrumen penelitian yang memiliki nilai *cronbach's alpha* $> 0,90$ maka reliabilitasnya sempurna. Semakin tinggi nilai *cronbach's alpha* maka

instrumen tersebut semakin memiliki memiliki tingkat konsistensi yang tinggi. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15.
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------|------------------|-----------------------|
| SPI | 0,958 | Reliabilitas Sempurna |
| KPP | 0,938 | Reliabilitas Sempurna |
| KO | 0,918 | Reliabilitas Sempurna |
| KPD | 0,921 | Reliabilitas Sempurna |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil perhitungan uji reliabilitas mengenai jawaban responden untuk setiap variabel penelitian dimana keseluruhan berjumlah 120 jawaban reponden. Hasil pengujian reliabilitas variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,958 > 0,90$ yang artinya tingkat konsistensi responden dalam menjawab pernyataan 95,8% dapat dipercaya. Variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,938 > 0,90$ yang artinya tingkat konsistensi responden dalam menjawab pernyataan 93,8% dapat dipercaya. Kemudian, variabel Komitmen Organisasi (KO) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,918 > 0,90$ yang artinya tingkat konsistensi responden dalam menjawab pernyataan 91,8% dapat dipercaya. Sedangkan, variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $0,921 > 0,90$ yang artinya tingkat konsistensi responden dalam menjawab pernyataan 92,1% dapat dipercaya. Seluruh nilai *cronbach's alpha* pada variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), dan Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) di atas

0,90 dan mendekati angka satu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai reliabilitas sempurna.

D. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui layak atau tidaknya model regresi dan apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik maka uji asumsi klasik dibutuhkan. Bila suatu model regresi tidak memenuhi kelayakan maka analisis data tidak dapat dilakukan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Dalam hal ini uji statistik One-Sample Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Suatu model regresi dapat dikatakan memiliki distribusi normal apabila hasil analisis nilai asymp sig (2-tailed) $>$ alpha 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16.
Hasil Uji Normalitas

| Persamaan Regresi | Asymp. Sig. (2-tailed) | Keterangan |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Model I | 0,062 | Normal |
| Model II | 0,062 | Normal |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov dalam penelitian ini menunjukkan bahwa model satu memiliki nilai asymp sig (2-tailed) sebesar $0,062 >$ alpha 0,05. Selain itu, hasil uji normalitas pada model dua dalam penelitian ini juga memiliki nilai asymp sig (2-tailed) sebesar

0,062 > alpha 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa residual data dari keseluruhan model berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan untuk analisis berikutnya.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi didapatkan ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Uji glejser dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan meregresi nilai absolut residual sebagai variabel dependen dengan berbagai variabel independen yang ada. Suatu model regresi dapat dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas apabila hasil analisis menunjukkan nilai sig > alpha 0,05 yang berlaku untuk tiap variabel pada masing-masing persamaan. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Persamaan Regresi | Variabel | Sig. | Keterangan |
|--------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|
| Model I | SPI | 0,624 | Non-Heteroskedastisitas |
| | KPP | 0,493 | Non-Heteroskedastisitas |
| Model II | SPI | 0,465 | Non-Heteroskedastisitas |
| | KPP | 0,816 | Non-Heteroskedastisitas |
| | KO | 0,052 | Non-Heteroskedastisitas |
| | SPI*KO | 0,421 | Non-Heteroskedastisitas |
| | KPP*KO | 0,319 | Non-Heteroskedastisitas |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas didapatkan nilai sig > alpha 0,05 baik pada persamaan regresi model satu maupun pada persamaan regresi model dua. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara seluruh variabel independen terhadap nilai absolute residual pada keseluruhan model. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap (homoskedastisitas).

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu korelasi yang tinggi atau hubungan pada model regresi antar variabel bebas. Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Nilai tolerance (*tolerance value*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*) dapat digunakan untuk mengetahui atau mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas. Suatu hasil analisis dapat dikatakan tidak mengalami multikolinearitas apabila mempunyai hasil *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.18.
Hasil Uji Multikolinearitas

| Persamaan Regresi | Variabel | Tolerance | VIF | Keterangan |
|-------------------|----------|-----------|-------|-----------------------|
| Model I | SPI | 0,830 | 1,206 | Non-Multikolinearitas |
| | KPP | 0,830 | 1,206 | Non-Multikolinearitas |
| Model II | SPI | 0,298 | 3,352 | Non-Multikolinearitas |
| | KPP | 0,338 | 2,962 | Non-Multikolinearitas |
| | KO | 0,270 | 3,698 | Non-Multikolinearitas |
| | SPI*KO | 0,170 | 5,869 | Non-Multikolinearitas |
| | KPP*KO | 0,159 | 6,287 | Non-Multikolinearitas |

Sumber: Data Primer (2019)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas didapatkan *tolerance value* > 0,10 dan VIF < 10 baik pada persamaan regresi model satu maupun pada persamaan regresi model dua. Hal tersebut menunjukkan tidak adanya korelasi yang tinggi antar

variabel independen yang dapat mengganggu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa asumsi non-multikolinearitas terpenuhi.

E. Uji Hipotesis dan Analisis Data

Uji hipotesis dan analisis data digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Uji hipotesis juga dapat memnerikan kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan yang bersifat objektif serta dengan analisis data dapat menentukan model analisis yang sesuai dengan penelitian.

1. Persamaan Regresi Model I

Pada persamaan regresi model satu akan menguji apakah variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD). Dengan demikian, perlunya menentukan model analisis yang digunakan serta melakukan uji koefisien determinasi (*adjusted R square*), uji signifikan simultan (F), dan uji signifikan parsial (t) dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan. Uji regresi linear berganda digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian ini. Variabel yang terlibat dalam hipotesis penelitian ini adalah dua variabel independen yaitu Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) serta satu variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah (KPD). Uji regresi linear berganda sendiri merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.19.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model I

| Variabel | Unstandardized Coefficients | t | Sig. t |
|-------------------|-----------------------------|-------|--------|
| | β | | |
| (Constant) | 18,608 | 4,175 | 0,000 |
| SPI | 0,107 | 1,985 | 0,049 |
| KPP | 0,255 | 1,997 | 0,048 |
| F | 6,752 | | |
| Sig. F | 0,002 | | |
| Adjusted R Square | 0,088 | | |

Sumber: Data Primer (2019)

a. Model Analisis

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda untuk model satu menunjukkan bahwa nilai konstan adalah sebesar 18,608. Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai β sebesar 0,107 dan variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) memiliki nilai β sebesar 0,255. Nilai β yang diperoleh pada persamaan regresi model satu tanpa interaksi komitmen organisasi ini dapat dilihat pada bagian *unstandardized coefficients*. Persamaan regresi linear berganda untuk model satu ini adalah sebagai berikut:

$$\text{KPD} = 18,608 + 0,107\text{SPI} + 0,255\text{KPP} + \varepsilon$$

1) Konstanta = 18,608

Persamaan regresi di atas menunjukkan konstanta memiliki nilai β sebesar 18,608. Artinya jika variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan maka Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar 18,608 satuan.

2) $\beta_1 = 0,107$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai β sebesar 0,107. Artinya jika variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) bertambah satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar 0,107 satuan atau 10,7% dengan catatan variabel bebas yang lain tetap atau konstan.

3) $\beta_2 = 0,255$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) memiliki nilai β sebesar 0,255. Artinya jika variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) bertambah satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar 0,255 satuan atau 25,5% dengan catatan variabel bebas yang lain tetap atau konstan.

b. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan metode pembuktian empiris untuk mengkonfirmasi atau menolak sebuah opini maupun asumsi dengan menggunakan data sampel. Hal tersebut dikarenakan hipotesis hanya sebagai teori yang sifatnya lemah dan masih perlu dibuktikan kebenarannya.

1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkatan kebenaran atas prediksi pada pengujian regresi yang dilakukan yaitu seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Suatu model regresi dapat dinyatakan memiliki kemampuan yang besar dalam menjelaskan apabila memiliki nilai yang mendekati 1. Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda model satu

menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,088. Artinya variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) mampu menjelaskan variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) sebesar 8,8% dan sisanya yaitu 91,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian.

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Bila hasil uji menghasilkan nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda model satu diperoleh nilai F sebesar 6,752 dengan nilai sig sebesar $0,002 < \alpha 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD).

3) Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu hipotesis dapat dinyatakan terdukung apabila memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, yaitu nilai sig lebih kecil dari nilai $\alpha 0,05$ ($\text{sig} < \alpha 0,05$) dan melihat arahnya pada bagian β untuk mengetahui koefisien regresi bernilai positif atau negatif. H_1 dan H_2 terdukung apabila nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$ dan koefisien regresi β_1 dan β_2 pada persamaan regresi model satu searah dengan arah hipotesis.

a) Uji Hipotesis 1 (H_1)

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai sig sebesar $0,049 < \alpha 0,05$ dengan nilai β sebesar 0,107 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H_1 terdukung yang berarti bahwa “Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah”.

b) Uji Hipotesis 2 (H_2)

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dapat diketahui bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) memiliki nilai sig sebesar $0,048 < \alpha 0,05$ dengan nilai β sebesar 0,255 (positif). Nilai tersebut dapat membuktikan H_2 terdukung yang berarti bahwa “Ketaatan pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah”.

2. Persamaan Regresi Model II

Pada persamaan regresi model dua akan menguji apakah Komitmen Organisasi (KO) mampu memperkuat pengaruh positif antara Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD). Dengan demikian, perlunya menentukan model analisis yang digunakan serta melakukan uji koefisien determinasi (*adjusted R square*), uji signifikan simultan (F), dan uji signifikan parsial (t) dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Uji regresi linear berganda dengan uji interaksi digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis penelitian ini. Uji interaksi sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang merupakan persamaan regresi linear berganda

dimana dalam persamaan regresinya tersebut mengandung unsur interaksi. Dalam uji interaksi ini Komitmen Organisasi (KO) berperan sebagai variabel moderasi serta Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) merupakan variabel independen yang dimoderasi dengan variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah (KPD). Uji regresi linear berganda dengan uji interaksi sendiri merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel moderasi mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.20.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda dengan Uji Interaksi Model II

| Variabel | Unstandardized Coefficients | t | Sig. t |
|-------------------|-----------------------------|--------|--------|
| | β | | |
| (Constant) | 24,079 | 4,285 | 0,000 |
| SPI | -0,118 | -1,741 | 0,084 |
| KPP | -0,316 | -2,079 | 0,040 |
| KO | 0,430 | 2,835 | 0,019 |
| SPI*KO | 0,004 | 2,276 | 0,025 |
| KPP*KO | 0,010 | 2,203 | 0,030 |
| F | 22,533 | | |
| Sig. F | 0,000 | | |
| Adjusted R Square | 0,475 | | |

Sumber: Data Primer (2019)

a. Model Analisis

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dengan uji interaksi untuk model dua menunjukkan bahwa nilai konstan adalah sebesar 24,079. Variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai β sebesar -0,118 dan variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) memiliki nilai β sebesar -0,316. Selain itu, variabel Komitmen Organisasi (KO) sebagai variabel moderasi memiliki nilai β sebesar

0,430. Kemudian, variabel Sistem Pengendalian Intern*Komitmen Organisasi (SPI*KO) memiliki nilai β sebesar 0,004 dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan*Komitmen Organisasi (KPP*KO) memiliki nilai β sebesar 0,010. Nilai β yang diperoleh pada persamaan regresi model dua dengan interaksi komitmen organisasi ini dapat dilihat pada bagian *unstandardized coefficients*. Persamaan regresi linear berganda dengan interaksi untuk model dua ini adalah sebagai berikut:

$$KPD=24,079-0,118SPI-0,316KPP+0,430KO+0,004(SPI*KO)+0,010(KPP*KO)+\epsilon$$

1) Konstanta = 24,079

Persamaan regresi di atas menunjukkan konstanta memiliki nilai β sebesar 24,079. Artinya jika variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP), Komitmen Organisasi (KO), Sistem Pengendalian Intern*Komitmen Organisasi (SPI*KO), dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan*Komitmen Organisasi (KPP*KO) dianggap bernilai 0 (nol) atau konstan maka Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar 18,608 satuan.

2) $\beta_1 = -0,118$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai β sebesar -0,118. Artinya jika variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) bertambah satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar -0,118 satuan atau -11,8% dengan catatan variabel bebas yang lain tetap atau konstan.

3) $\beta_2 = -0,316$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) memiliki nilai β sebesar -0,316. Artinya jika variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) bertambah satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar -0,316 satuan atau -31,6% dengan catatan variabel bebas yang lain tetap atau konstan.

4) $\beta_3 = 0,430$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Komitmen Organisasi (KO) memiliki nilai β sebesar 0,430. Artinya jika variabel Komitmen Organisasi (KO) bertambah satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar 0,430 satuan atau 43,0% dengan catatan variabel bebas yang lain tetap atau konstan.

5) $\beta_4 = 0,004$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Sistem Pengendalian Intern*Komitmen Organisasi (SPI*KO) memiliki nilai β sebesar 0,004. Artinya jika variabel Sistem Pengendalian Intern*Komitmen Organisasi (SPI*KO) bertambah satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) akan meningkat sebesar 0,004 satuan atau 0,4% dengan catatan variabel bebas yang lain tetap atau konstan.

6) $\beta_5 = 0,010$

Persamaan regresi di atas menunjukkan Ketaatan pada Peraturan Perundangan*Komitmen Organisasi (KPP*KO) memiliki nilai β sebesar 0,010. Artinya jika variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan*Komitmen Organisasi (KPP*KO) bertambah satu satuan maka variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD)

akan meningkat sebesar 0,010 satuan atau 1,0% dengan catatan variabel bebas yang lain tetap atau konstan.

b. Uji Hipotesis

1) Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Nilai koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui tingkatan kebenaran atas prediksi pada pengujian regresi yang dilakukan yaitu seberapa jauh variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Suatu model regresi dapat dinyatakan memiliki kemampuan yang besar dalam menjelaskan apabila memiliki nilai yang mendekati 1. Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dengan uji interaksi model dua menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,475. Artinya variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) setelah dimoderasi Komitmen Organisasi (KO) mampu menjelaskan variabel Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) sebesar 47,5% dan sisanya yaitu 52,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Dengan demikian, nilai *adjusted R square* dari persamaan regresi model dua lebih besar daripada nilai *adjusted R square* dari persamaan regresi model satu yaitu $0,475 > 0,088$.

2) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan atau bersama-sama antara variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat). Bila hasil uji menghasilkan nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa terdapat pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji regresi

linear berganda dengan uji interaksi model dua diperoleh nilai F sebesar 22,533 dengan nilai sig sebesar $0,000 < \alpha 0,05$. Artinya variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) setelah dimoderasi Komitmen Organisasi (KO) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (KPD). Dengan demikian, nilai F dari persamaan regresi model dua lebih besar daripada nilai F dari persamaan regresi model satu yaitu $22,533 > 6,752$.

3) Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Suatu hipotesis dapat dinyatakan terdukung apabila memenuhi kriteria yang sudah ditentukan, yaitu nilai sig lebih kecil dari nilai $\alpha 0,05$ ($\text{sig} < \alpha 0,05$) dan melihat arahnya pada bagian β untuk mengetahui koefisien regresi bernilai positif atau negatif. H_3 dan H_4 terdukung apabila koefisien regresi β_4 dan β_5 pada persamaan regresi dengan interaksi model dua memiliki arah positif dan nilai $\text{sig} < \alpha 0,05$. Selain itu, terdukungnya H_3 dan H_4 juga dapat dilihat melalui besarnya nilai parsial atau t. Apabila nilai t pada persamaan regresi dengan interaksi model dua $>$ nilai t pada persamaan regresi tanpa interaksi model satu maka variabel moderasi berhasil memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

a) Uji Hipotesis 3 (H_3)

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dengan uji interaksi dapat diketahui bahwa Sistem Pengendalian Intern*Komitmen Organisasi (SPI*KO)

memiliki nilai sig sebesar $0,025 < \alpha 0,05$ dengan nilai β sebesar 0,004 (positif). Pada uji regresi linear berganda dengan interaksi model dua juga Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki nilai t lebih besar daripada nilai t pada uji regresi linear berganda model satu yaitu $2,276 > 1,985$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_3 terdukung yang berarti bahwa “Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah”.

b) Uji Hipotesis 4 (H_4)

Berdasarkan tabel hasil uji regresi linear berganda dengan uji interaksi dapat diketahui bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan*Komitmen Organisasi (KPP*KO) memiliki nilai sig sebesar $0,030 < \alpha 0,05$ dengan nilai β sebesar 0,010 (positif). Pada uji regresi linear berganda dengan interaksi model dua juga Ketaatan pada Peraturan Perundangan (KPP) memiliki nilai t lebih besar daripada nilai t pada uji regresi linear berganda model satu yaitu $2,203 > 1,997$. Nilai tersebut dapat membuktikan H_4 terdukung yang berarti bahwa “Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah”.

F. Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berjumlah lima hipotesis dimana peneliti menggunakan dua model persamaan regresi. Untuk H_1 dan H_2 menggunakan persamaan regresi model pertama yaitu persamaan regresi linear berganda tanpa interaksi, sedangkan H_3 dan H_4 menggunakan persamaan regresi model kedua yaitu

persamaan regresi linear berganda dengan interaksi. Ringkasan hasil hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.21.
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

| Hipotesis | Hasil |
|---|--------------|
| H ₁ : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. | Terdukung |
| H ₂ : Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. | Terdukung |
| H ₃ : Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah. | Terdukung |
| H ₄ : Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah. | Terdukung |

Sumber: Data Primer (2019)

G. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh hipotesis terdukung.

1. Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang ditetapkan untuk digunakan dalam melakukan kegiatan dan program seperti pembentukan struktur dalam organisasi dan seluruh metode yang dibutuhkan maupun alat-alat yang perlu

dikoordinasikan (Prayoga, 2017). Hal tersebut didasarkan pada teori *stewardship*, dimana *steward* yaitu pemerintah memiliki tindakan kolektif atau berkelompok dan bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi, meminimalkan segala sesuatu yang mungkin terjadi diluar rencana, dan menghindari terjadinya konflik kepentingan antara *steward* dan *principal* (Puyvelde *et al.*, 2012). Selain itu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern memberikan keyakinan dan kepastian bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang dilaksanakan berdasar prinsip *value for money* yang dinilai berdasarkan ekonomisasi, efisiensi, serta efektivitas (3E), pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap atauran yang berlaku dalam pemerintahan tersebut.

Hasil pengujian hipotesis yang pertama (H_1) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) terdukung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai sig sebesar $0,049 < \alpha 0,05$ dan nilai t sebesar 1,985 serta nilai β sebesar 0,107 (arah positif) yang artinya semakin kuat sistem pengendalian intern dalam pemerintahan maka akan meningkatkan kinerja dari pemerintah tersebut. Jadi, sistem pengendalian intern di Kabupaten Bantul telah dirancang, ditetapkan, serta dilaksanakan berdasar prinsip *value for money* sesuai dengan kompleksitas, ukuran, dan fungsi dari pemerintah daerah di Kabupaten Bantul. Selain itu, sistem pengendalian intern yang diterapkan di Kabupaten Bantul menunjukkan kerjasama yang tinggi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu dengan penyamaan

kepentingan guna menghindari terjadinya konflik antara *steward* dan *principal* sehingga rencana atau tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai.

Pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dalam memperkuat sistem pengendalian intern melakukan beberapa tindakan pengawasan intern meliputi pengendalian terhadap lingkungan, penilaian atau analisis risiko, aktivitas pengendalian untuk menangani risiko, adanya informasi dan komunikasi, serta pemantauan terhadap pengendalian intern. Pengawasan intern ini dilakukan untuk mendukung kesesuaian tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan dan sasaran dalam organisasi tersebut, meminimalkan hal-hal yang mungkin terjadi diluar rencana yang dapat menghambat tercapainya tujuan pemerintah, memberikan opini terhadap kinerja pemerintah, dan dilakukan untuk meningkatkan mutu serta profesionalisme agar program maupun kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar normatif yang telah ditentukan. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah karena keberhasilan dalam penerapan sistem pengendalian intern sehingga kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dapat dinilai baik. Selain itu, sistem pengendalian intern dapat merupakan salah satu faktor diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul meskipun terdapat beberapa permasalahan yang tidak material namun tetap perlu perbaikan.

Hasil penelitian tersebut selajalan dengan penelitian Putra dan Putra (2018) yang dilakukan di Pemerintah Daerah Karangasem menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah karena sistem pengendalian intern memiliki peran yang besar dalam berjalannya suatu

pemerintahan dan hal yang harusnya ada disetiap instansi pemerintah daerah. Selain itu, hasil penelitian Olinda (2015) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Indragiri Hulu, Lestari (2016) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Pariaman, dan Prayoga (2017) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Pelalawan menunjukkan adanya pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Ketaatan pada Peraturan Perundangan Berpengaruh Positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Secara teoritis, ketaatan pada aturan yang berlaku merupakan suatu kewajiban. Sebab, apabila dalam pembuatan atau penyusunan laporan keuangan tanpa menaati aturan dan ketentuan yang berlaku maka situasi tersebut dapat dinyatakan sebagai kegagalan dalam penyusunannya yang pada akhirnya akan timbul kecenderungan untuk melakukan pelanggaran dan perilaku tidak etis lainnya sehingga auditor tidak dapat atau sulit untuk menelusurinya (Nurina dan Yahya, 2016). Hafiz (2017) mengemukakan bahwa akuntansi sektor publik di Indonesia menganut sistem hukum yang disebut dengan hukum perdata (*civil law*) dimana setiap aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dicantumkan dalam peraturan perundangan. Ketaatan pada peraturan perundangan merupakan elemen penting bagi pemerintah daerah karena secara langsung berkaitan dengan pencapaian kinerja pemerintah daerah.

Dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintahan diperlukannya peraturan perundangan sebagai pedomannya (Wahid, 2016). Dengan adanya hal ini, diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan akan tepat dan sesuai

dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Teori *stewardship* menyatakan bahwa *steward* akan termotivasi pada tujuan organisasi dan bertindak untuk kepuasan pihak yang berkepentingan karena dalam teori tersebut *steward* akan lebih mengutamakan kepuasan *principal*. Peraturan perundangan dapat dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat serta kewajiban terhadap pemerintah pusat agar terhindar dari penyimpangan yang akan merugikan *principal*.

Hasil pengujian hipotesis yang kedua (H_2) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) terdukung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai sig sebesar $0,048 < \alpha 0,05$ dan nilai t sebesar 1,997 serta nilai β sebesar 0,255 (arah positif) yang artinya semakin taatnya pejabat pada peraturan perundangan maka akan meningkatkan kinerja dari pemerintah tersebut. Jadi, dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan, aparat pemerintah di Kabupaten Bantul telah didasarkan pada peraturan perundangan sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang tepat dan sesuai. Selain itu, ketaatan pada peraturan perundangan yang diterapkan di Kabupaten Bantul menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menghindari penyimpangan yang akan merugikan *principal* karena *steward* lebih mengutamakan kepuasan pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah pusat dan masyarakat.

Pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dalam memperkuat ketaatan pada peraturan perundangan melakukan beberapa tindakan yaitu pemberian sanksi

terhadap aparat pemerintah yang melakukan penyimpangan dan pemantauan terhadap standar yang telah digunakan oleh aparat dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mendorong kelancaran dari berjalannya program maupun kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi dan meminimalisir terjadinya kecurangan yang dapat merugikan pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, serta masyarakat. Dengan demikian, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah karena keberhasilan dalam penerapan kewajiban seorang aparat pemerintah untuk menaati peraturan perundangan sehingga kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dapat dinilai baik. Selain itu, ketaatan pada peraturan perundangan dapat merupakan salah satu faktor diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul meskipun terdapat beberapa permasalahan yang tidak material namun tetap perlu perbaikan.

Hasil penelitian tersebut sejajalan dengan penelitian Nurina dan Yahya (2016) yang dilakukan di Pemerintah Daerah Banda Aceh mengemukakan bahwa terdapat pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja dari instansi pemerintahan karena apabila suatu peraturan perundangan tidak ditaati maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pemerintahan yang juga berdampak pada pihak lain seperti pemerintah pusat dan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan Zulharman (2015) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Pekanbaru, Setyawan dkk (2017) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Kampar, dan Razi (2017) dengan objek penelitian Pemerintah

Daerah Indragiri Hulu menyatakan adanya pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja instansi pemerintah.

3. Komitmen Organisasi Memperkuat Pengaruh Positif antara Sistem Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Komitmen organisasi aparat pemerintah menjadi salah satu faktor yang berperan besar dalam organisasi, karena sebagai sumber daya manusia pegawai memiliki peran paling dominan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi (Wardhana dkk., 2015). Llobet dan Fito (2013) menyatakan bahwa komitmen organisasi dapat menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) aparat terhadap organisasi sehingga memiliki rasa perhatian dan tanggung jawab yang tinggi pada organisasi. Oleh sebab itu, aparat pemerintah akan bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi yaitu mewujudkan prinsip *value for money* karena menganggap kepentingan organisasi sebagai prioritas serta akan menggunakan dan memanfaatkan kemampuan dan keterampilan dengan semangat ketika bekerja. Hal tersebut sejalan dengan teori penetapan tujuan yaitu jika dalam diri seseorang mempunyai komitmen dalam pencapaian tujuan tertentu maka komitmen yang telah ditanamkan dalam diri seseorang tersebut akan mempengaruhi tindakan serta kinerja yang dicapainya (Akbar dan Irwandi, 2014).

Organisasi dengan sistem pengendalian yang baik tetapi tidak didukung dengan komitmen organisasi yang tinggi dari pimpinan serta seluruh pegawainya maka sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan hanya merupakan sebuah prosedur yang tidak bernilai. Semua orang yang terlibat dalam program maupun kegiatan tidak akan menerapkan sistem tersebut sepenuhnya karena keberhasilan

organisasi bukan merupakan prioritasnya. Hal ini tentu akan mengakibatkan rendahnya kinerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut. Dengan demikian, seorang aparat apabila memiliki komitmen organisasi yang kuat maka kinerja dari aparatur pemerintah daerah juga terpengaruh dimana aparat tersebut akan berusaha dengan maksimal demi tercapainya tujuan dan sasaran dari organisasi serta mengedepankan kepentingan organisasi dan publik daripada kepentingan pribadi dari individu. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh pegawai pemerintah pada akhirnya akan memberikan implikasi pada komitmen untuk bertanggungjawab atas penggunaan dari sistem pengendalian intern.

Hasil pengujian hipotesis yang ketiga (H_3) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) terdukung. Hal tersebut dapat dibuktikan pada persamaan regresi model dua dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki nilai sig sebesar $0,025 < \alpha 0,05$ dan nilai t sebesar 2,276 serta nilai β sebesar 0,004 (arah positif), sedangkan pada persamaan regresi model satu tanpa adanya komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki nilai sig sebesar $0,049 < \alpha 0,05$ dan nilai t sebesar 1,985 serta nilai β sebesar 0,107 (arah positif). Selanjutnya, dapat diketahui sebelumnya bahwa nilai t model dua lebih besar daripada nilai t model satu ($2,276 > 1,985$).

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan persamaan regresi model dua dengan interaksi antara komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern

memberikan pengaruh positif lebih besar terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dibandingkan persamaan regresi model satu tanpa interaksi dari komitmen organisasi. Artinya, semakin kuat sistem pengendalian intern yang terdapat dalam pemerintahan dan didorong dengan semakin tingginya komitmen aparat terhadap organisasinya maka kinerja dari pemerintah daerah tersebut akan meningkat. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2018) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Morus yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel moderasi yang sangat mempengaruhi hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah daerah karena komitmen organisasi mampu mendorong seorang individu untuk bekerja demi organisasi dengan menjalankan tugas sesuai sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan.

4. Komitmen Organisasi Memperkuat Pengaruh Positif antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Mowday *et al* (1979) mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (*goal*) yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi merupakan variabel yang sangat mempengaruhi kinerja aparat karena komitmen organisasi merupakan faktor internal (*internal side*) yang kuat dalam individu dan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Selain itu, komitmen organisasi merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan (Pundarika dan Dwirandra, 2019).

Teori penetapan tujuan mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan (Fara dkk, 2018). Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuan organisasi maka hal tersebut akan dapat mempengaruhi tindakan dan kinerjanya, yaitu menggunakan kapasitasnya untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas. Begitu pula sebaliknya jika memiliki komitmen yang rendah maka kinerja yang dihasilkan juga rendah. Hal tersebut dikarenakan menurut teori penetapan tujuan, aparat yang didukung dengan komitmen yang tinggi terhadap organisasi (instansi) pemerintah daerah maka akan lebih mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi.

Ketaatan pada peraturan perundangan akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Namun, apabila ketaatan pada peraturan perundangan dalam pelaksanaannya diperkuat dengan komitmen organisasi maka kinerja yang dihasilkan semakin tinggi. Melalui dukungan komitmen organisasi, sumber daya manusia akan menggunakan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep tersebut menggambarkan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor internal (*internal side*) dalam diri setiap aparat yang dapat mempengaruhi kinerja aparat bersangkutan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Selanjutnya, ketaatan pada peraturan perundangan merupakan faktor eksternal (*eksternal side*) yang dirancang untuk dilaksanakan oleh setiap aparat agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan yang dapat merugikan pemerintah daerah itu sendiri, pemerintah pusat, serta masyarakat. Dengan demikian, seorang aparat

apabila memiliki komitmen organisasi yang kuat maka kinerja dari aparatur pemerintah daerah juga terpengaruh dimana aparat akan berusaha dengan maksimal demi tercapainya tujuan dan sasaran dari organisasi serta mengedepankan kepentingan organisasi dan publik daripada kepentingan pribadi dari individu. Komitmen organisasi yang dimiliki oleh aparat pemerintah pada akhirnya akan berimplikasi pada komitmen untuk menaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Wuryani (2013) juga mengemukakan bahwa pada saat seseorang berkomitmen terhadap organisasi, seseorang tersebut akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk berperilaku berdasarkan norma yang diterapkan pada instansi dibandingkan mereka yang tidak memiliki komitmen.

Hasil pengujian hipotesis yang keempat (H_4) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bantul. Dengan demikian, hipotesis keempat (H_4) terdukung. Hal tersebut dapat dibuktikan pada persamaan regresi model dua dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki nilai sig sebesar $0,030 < \alpha 0,05$ dan nilai t sebesar 2,203 serta nilai β sebesar 0,010 (arah positif), sedangkan pada persamaan regresi model satu tanpa adanya komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memiliki nilai sig sebesar $0,048 < \alpha 0,05$ dan nilai t sebesar 1,997 serta nilai β sebesar 0,255 (arah positif). Selanjutnya, dapat diketahui sebelumnya bahwa nilai t model dua lebih besar daripada nilai t model satu ($2,203 > 1,997$).

Sehubungan dengan itu, dapat disimpulkan persamaan regresi model dua dengan interaksi antara komitmen organisasi dengan ketaatan pada peraturan perundangan memberikan pengaruh positif lebih besar terhadap kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul dibandingkan persamaan regresi model satu tanpa interaksi dari komitmen organisasi. Artinya, semakin taatnya pejabat pada peraturan perundangan dan didorong dengan komitmen yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hafiz (2017) dengan objek penelitian Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan variabel moderasi yang sangat mempengaruhi hubungan antara ketaatan pada peraturan perundangan terhadap kinerja pemerintah daerah.